

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, penulis dapat mengambil simpulan yaitu:

1. Proses pelaksanaan anggaran belanja dimulai dengan proses pengajuan pencairan anggaran belanja yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dinas. Pengajuan anggaran belanja dilakukan bendahara pengeluaran setelah menerima surat penyediaan dana (SPD) dengan menggunakan surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Pada saat pelaksanaan anggaran belanja tersebut sering muncul hambatan-hambatan antara lain:
  - a. Pada proses pelaksanaan kegiatan, kadangkala PPTK terlambat menyampaikan bukti transaksi berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran belanja yang dilakukannya kepada Bendahara Pengeluaran, keterlambatan penyampaian SPJ terhadap satu kegiatan akan mengakibatkan keterlambatan dalam penggantian uang persediaan sehingga mengakibatkan keterlambatan terhadap pencairan dana untuk pembiayaan kegiatan yang lain. Dikarenakan uang persediaan (UP) pada Dinas Pertanian

dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo adalah UP per KPA, dapat dibayangkan apabila KPA tersebut mengelola 20 kegiatan maka bendahara pengeluaran pembantu harus dapat memanajemen uang persediaan yang terbatas untuk 20 kegiatan

- b. Terjadinya kesalahan pada saat penyusunan anggaran, misalnya kesalahan kode rekening, lokasi kegiatan atau standar harga tertinggi (SHT). Maka anggaran belanja tersebut akan dibekukan sehingga tidak dapat mencairkan dana dan secara otomatis kegiatan dinasapun tidak dapat dilaksanakan secara sempurna.
  - c. Belum terlaksananya sistem akuntansi secara utuh dikarenakan beberapa alasan, diantaranya belum adanya sistem akuntansi yang terkomputerisasi, kurangnya tenaga pelaksana yang menangani akuntansi serta belum adanya sistem akuntansi barang daerah
  - d. Dalam hal pengendalian intern, jarang sekali melakukan job rotation bagi pengelola keuangan dikarenakan kurangnya personil yang sesuai dengan bidang keuangan (misalnya bendahara harus memiliki sertifikasi kebhendaharaan).
2. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja disampaikan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo baik yang bersifat maupun insidental. Laporan pertanggungjawaban keuangan rutin bulanan, semesteran, prognosis dan laporan akhir tahun telah dapat dipenuhi tepat waktu. Hanya saja untuk neraca dinas, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo masih mengalami

kesulitan dikarenakan belum adanya sistem akuntansi barang daerah, dalam hal ini untuk mencatat penilaian aset dan persediaan. Selama ini yang dilakukan adalah dengan adanya stock opname oleh bendahara barang pada tanggal 30 juni dan 31 desember tetapi untuk penyusutan, depresiasi belum ada pedoman baku dari pemerintah daerah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang mungkin bisa berguna:

- a. Pada tahap pelaksanaan anggaran seharusnya PPTK taat dan patuh pada jadwal program kerja yang disusunnya, begitupula ketika membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bukti transaksi atas pengeluaran dana belanja yang telah dilaksanakannya sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan yang lainnya.
- b. Diperlukan kecermatan yang lebih baik lagi pada saat penyusunan anggaran agar kesalahan kode rekening, lokasi kegiatan serta standar harga dapat diminimalisir.
- c. Sebaliknya Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo, mengusulkan kepada Bagian keuangan Sekretariat daerah selaku unit pelaporan induk pemda untuk membentuk sistem akuntansi SKPD yang terkomputerisasi.

- d. Perlu dilakukan rotasi pengelola keuangan secara rutin sehingga meminimalisir tingkat penyimpangan.
- e. Kendala yang dihadapi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo pada saat pertanggungjawaban pada semester pertama dan akhir tahun adalah penyusunan neraca dinas dikarenakan belum adanya pedoman umum yang jelas mengenai sistem akuntansi barang daerah yang merupakan sistem akuntansi SKPD. Maka sebaiknya Distankeb mengusulkan agar pemerintah daerah membuat pedoman umum sistem akuntansi barang daerah.